



2024



LAPORAN KINERJA  
**BALAI KIPM  
LAMPUNG**  
**TW II**



## PRAKATA

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Lampung Triwulan II Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja pada periode Triwulan II TA 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Lampung. Secara umum seluruh indikator kinerja Balai KIPM Lampung yang diukur pada Triwulan II Tahun 2024 ada yang telah mencapai bahkan melebihi target Triwulan II Tahun 2024. Capaian kinerja positif IKU Balai KIPM Lampung Pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain adalah Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik. Monitoring Kesegarana Ikan, residu bahan berbahaya. Unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan yang menerapkan system Traceability. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan. Nilai Survei kepuasan masyarakat layanan public. Verifikasi penerapan system pengendalian (Official Control) lingkup Otoritas Kompeten. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang melalulintaskan Ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan. Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai KIPM Lampung atas tersusunnya.

Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Balai KIPM Lampung



Asnan Syarif.S.P.M.P

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (Balai KIPM Lampung), Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Badan KIPM) rencana kinerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada tahun 2024 Balai KIPM Lampung menetapkan 3 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran Strategis tersebut adalah 1) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan ikan secara professional dan partisipatif 2). Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, dan 3). Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Balai KIPM Lampung melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).

Jumlah Sasaran Strategis yang dapat diukur sebanyak 3 buah yang merupakan indikator pada SS-1 sampai dengan SS-3. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Skor Kinerja IKU Triwulan II Tahun 2024 adalah 110,62 atau masuk dalam kriteria Istimewa (Biru). Secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur dan dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	REALIASI TW II	
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
SK 1.1	Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Sertifikat)	7	10	120
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	6	7	117
		3	Monitoring Kesegaran Ikan, residu bahan berbahaya Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	1	1	100
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	1	2	111
		5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Produk)	21	27	120
		6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Lampung(%)	17	18	106
<b>Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK 2.1	Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	84	91,42	109
		8	Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	50	50	100
		9	Tingkat Kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/ peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	90	100	111
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>						
SK 3.1	Tatakelola pemerintaha n yang baik lingkup BKIPM	10	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Lampung	0	0	0

		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	81	84,61	105
		12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		13	Persentase penyelesaian Temuan BPK atas LK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	0	0	0
		14	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	80	98	120
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	83	88,54	107
		16	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	40	43,49	109
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	0	0	0
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	0	0	0

Adapun dari anggaran, Triwulan II pada Tahun 2024 Balai KIPM Lampung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.495.461.681,- atau 43.49 % dari PAGU yang dikelola sebesar Rp.8.031.999.000,-. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 BKIPM Lampung secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian.

← → ↻ spanint.kemken.go.id/spanint/latest/app/#span/BA\_ES1/DataRealisasiAkunES1

OM-SPAN STASIUN KARANTI... T.A. 2024 WhatsApp

### Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

EXCEL PDF FILTER

FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. JUNI CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE   NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER			
1	649615   BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	PAGU	4,186,224,000	3,845,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,031,999,000
		REALISASI	2,500,096,393 (59.72%)	993,365,288 (25.83%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,493,461,681 (43.49%)
		SISA	1,686,127,607	2,852,409,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,537,319
GRAND TOTAL		PAGU	4,186,224,000	3,845,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,031,999,000
		REALISASI	2,500,096,393 (59.72%)	993,365,288 (25.83%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,493,461,681 (43.49%)
		SISA	1,686,127,607	2,852,409,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,537,319

2 PER HALAMAN « < 1 > » 1-2 DARI 2 REFRESH

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISIPRAKATA.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	2
D. AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG.....	6
E. DASAR PENGUKURAN KINERJA.....	7
F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA .....	7
G. RUANG LINGKUP.....	7
H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA .....	7
I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	8
J. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB 2.....	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024.....	9
1. Visi KKP dan Badan KIPM KKP .....	9
2. Misi Balai KIPM Lampung .....	10
3. Tujuan Balai KIPM Lampung.....	10
4. Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung .....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	12
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024.....	12
D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM Lampung.....	15
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/ IK.....	17
BAB 3.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM Lampung .....	18
B. CAPAIAN KINERJA.....	18
3.1. Realisasi Anggaran.....	63
3.2. Efisiensi Anggaran.....	64



C.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA TW II TA 2024 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	66
D.	ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TW II TAHUN 2024 .....	68
	BAB 4 PENUTUP .....	69
A.	KESIMPULAN .....	69
B.	PERMASALAHAN .....	69
C.	LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI) .....	70
	LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung TW II Tahun 2024 .....	v
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024 .....	14
Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja.....	21
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung TW II Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IK1 TW II Tahun 2024.....	27
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi IK2 TW II Tahun 2024.....	29
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi IK3 TW II Tahun 2024.....	30
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi IK4 TW II Tahun 2024.....	32
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IK 5 TW II Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi IK 6 TW II Tahun 2024.....	35
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 7 TW II Tahun 2024.....	36
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 8 TW II Tahun 2024.....	38
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi IK 9 TW II Tahun 2024.....	39
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi IK 10 TW II Tahun 2024.....	42
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 11 TW II Tahun 2024.....	43
Tabel 3. 14 Target dan Realisasi IK 12 TW II Tahun 2024.....	44
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 13 TW II Tahun 2024.....	45
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 14 TW II Tahun 2024.....	46
Tabel 3. 17 Target dan Realisasi IK 15 TW II Tahun 2024.....	47
Tabel 3. 18 Target dan Realisasi IK 16 TW II Tahun 2024.....	49
Tabel 3. 19 Target dan Realisasi IK 17 TW II Tahun 2024.....	50
Tabel 3. 20 Target dan Realisasi IK 18 TW II Tahun 2024.....	50
Tabel 3. 21 Data Anggaran .....	65
Tabel 3. 22 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode Triwulan II Tahun 2024	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung .....	4
Gambar 3. 1 Dashboard Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung TW II Tahun 2024 .....	19
Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TW II Tahun 2024 Balai KIPM Lampung.....	40

## BAB 1 PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mendukung Visi nasional kita " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" melalui Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia yang diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan yang baik salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Selaras dengan fungsinya Badan KIPM menyelenggarakan fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan, sebagai aparat ASN seluruh pegawai BKIPM dituntut untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- **DASAR HUKUM**

Balai KIPM Lampung melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Lampung memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai KIPM Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

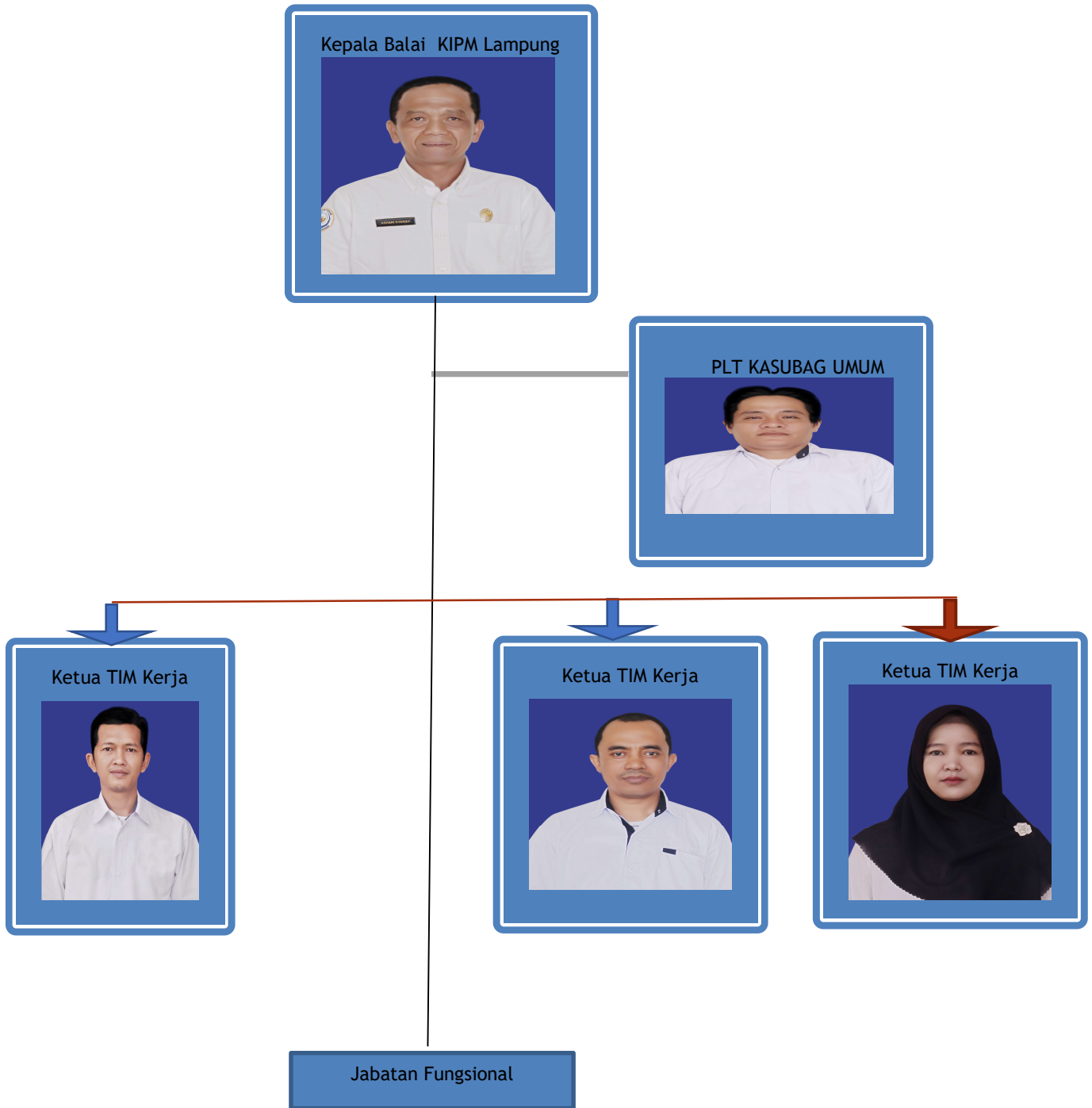
- Menyusun kebijakan teknis, rencana, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan administrasi badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan pengujian terhadap mutu hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- Menyusun pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- Menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil perikanan.
- Mengumpulkan, pengolahan data dan informasi, pengendalian mutu, hayati ikan; dan
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung

- AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG

Salah satu agenda misi pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional yaitu dengan meningkatkan sistem Pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan, dengan meningkatnya peran serta Balai KIPM Lampung diharapkan mampu mencapai misi tersebut.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktiktata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai KIPM Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam agenda pembangunan nasional berupa Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.



- **DASAR PENGUKURAN KINERJA**
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang  
Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai KIPM Lampung Nomor : SP DIPA- 032.13.0.649615/2024 tanggal 24 November 2023.

- **TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

- Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Balai KIPM Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
- Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing Balai KIPM Lampung.

- **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Balai KIPM Lampung dan Perjanjian Kinerja level 2 yang disepakati Kepala Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM.

- **WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

1. Periode yang dinilai : April s.d. Juni 2024
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Juli 2024

- METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

- Pengukuran atas Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan 30 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024.
- Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 15 Juli 2024.

- SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan BKIPM, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU;
- 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Balai KIPM Lampung, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024, dan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024; dan
- 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja

## BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2020-2024 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024 dan turunannya pada Balai KIPM Lampung sebagai bagian dari unit Eselon I di bawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Visi KKP dan Badan KIPM KKP

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah :

*“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,berlandaskan Gotong Royong”*

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Balai KIPM Lampung merancang visinya sesuai misi BKIPM sebagai berikut :

*“Hasil Perikanan yang sehat, bermutu aman dan terpercaya untuk terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.”*

Visi tersebut *dilatarbelakangi* oleh adanya keinginan seluruh pegawai Badan KIPM KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP. Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

## 2. Misi Balai KIPM Lampung

Misi Balai KIPM Lampung dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Badan KIPM, yaitu: Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Balai

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas hama dan penyakit.

KIPM Lampung dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

## 3. Tujuan Balai KIPM Lampung

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Balai KIPM Lampung Adapun tujuan strategis Balai

KIPM Lampung :

- a. *Terwujudnya Kinerja Balai KIPM Lampung yang Efektif dan Efisien;*
- b. *Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola Balai KIPM Lampung yang Baik;*
- c. *Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan Balai KIPM Lampung*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan operasional Balai KIPM Lampung. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Balai KIPM Lampung yang disampaikan di atas tertuang dalam rancangan Renstra Balai KIPM Lampung 2020-2024 yang telah ditetapkan seiring dengan penetapan Renstra BKIPM.

4. Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung

Secara keseluruhan, melaksanakan Sasaran Strategis menjadi 3 (empat) SS seperti disajikan pada tabel berikut.

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan partisipatif
2	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung Tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup BKIPM, Balai KIPM Lampung harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Badan KIPM. Sasaran Strategis (SS) lingkup Balai KIPM Lampung merupakan mendukung capaian kinerja level Badan KIPM, (level 1). Selanjutnya, hal tersebut di-*cascading* ke level di bawahnya dan di-*alignment* antar staff ke seluruh pegawai Balai KIPM Lampung.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2024, Balai KIPM Lampung melaksanakan 3 (Tiga) kegiatan utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 8.031.999.000. Kedua kegiatan tersebut adalah :

1. Pengendalian mutu anggaran senilai Rp. 409.450.000
2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Alokasi anggaran Rp.1.516.500.000
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai KIPM Lampung dengan alokasi anggaran senilai Rp 6.106.049.000

## C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024

Penetapan kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM tersaji dalam Lampiran 1.sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan	1	Sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Sertifikat)		10

	<i>sistem perkarantinaan ikan secara professional dan partisipatif</i>	2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestic lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	6
		3	Monitoring Kesegaran Ikan,Residu bahan berbahaya Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	1
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI)	5
		5	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (produk )	45
		6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI)	17
		<b>Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>		
SK3. 1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan <i>sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan</i> secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung(nilai)	84
		8	Verifikasi Penerapan sistem pengendalian (Official Control) lingkup otoritas komptteten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	73
		9	Tingkat Kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perianan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	90
<b>Kegiatan 4 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK.4.1	<b>Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM</b>	10	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Lampung	75
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	86
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	82
		13	Persentase penyelesaian Temuan BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100
		14	Presentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	80
		15	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai IPM Lampung	93.76
		16	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung	82

		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Lampung	77.5
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	77.5

Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024



#### D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM LAMPUNG

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai UPT BPPMHKP lingkup KKP, Balai KIPM Lampung melaksanakan program dan kegiatan Pengendalian mutu, karantina ikan, Sistem dan Standar Kepatuhan, dan Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan;

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
3. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
6. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan





BAB 3  
AKUNTABILITAS KINERJA

**A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM LAMPUNG**

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Balai KIPM Lampung membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing bagian di Balai KIPM Lampung untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap Tri wulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Kode Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	BAIK	Nilai 90 - < 110
3.	CUKUP	Nilai 70 - < 90
4.	Kurang	Nilai 50 - < 70
5.	Sangat Kurang	Belum Input Capaian
6.	Belum ada Penilaian	

Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung tahun 2024 terdiri dari 3 (Tiga) SS yang diukur keberhasilannya melalui capaian 18 IKU/IK dengan target yang ditentukan.

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Balai KIPM Lampung dari bulan April sampai dengan Juni 2024. Capaian kinerja yang diukur per Triwulan II pada Tahun 2024

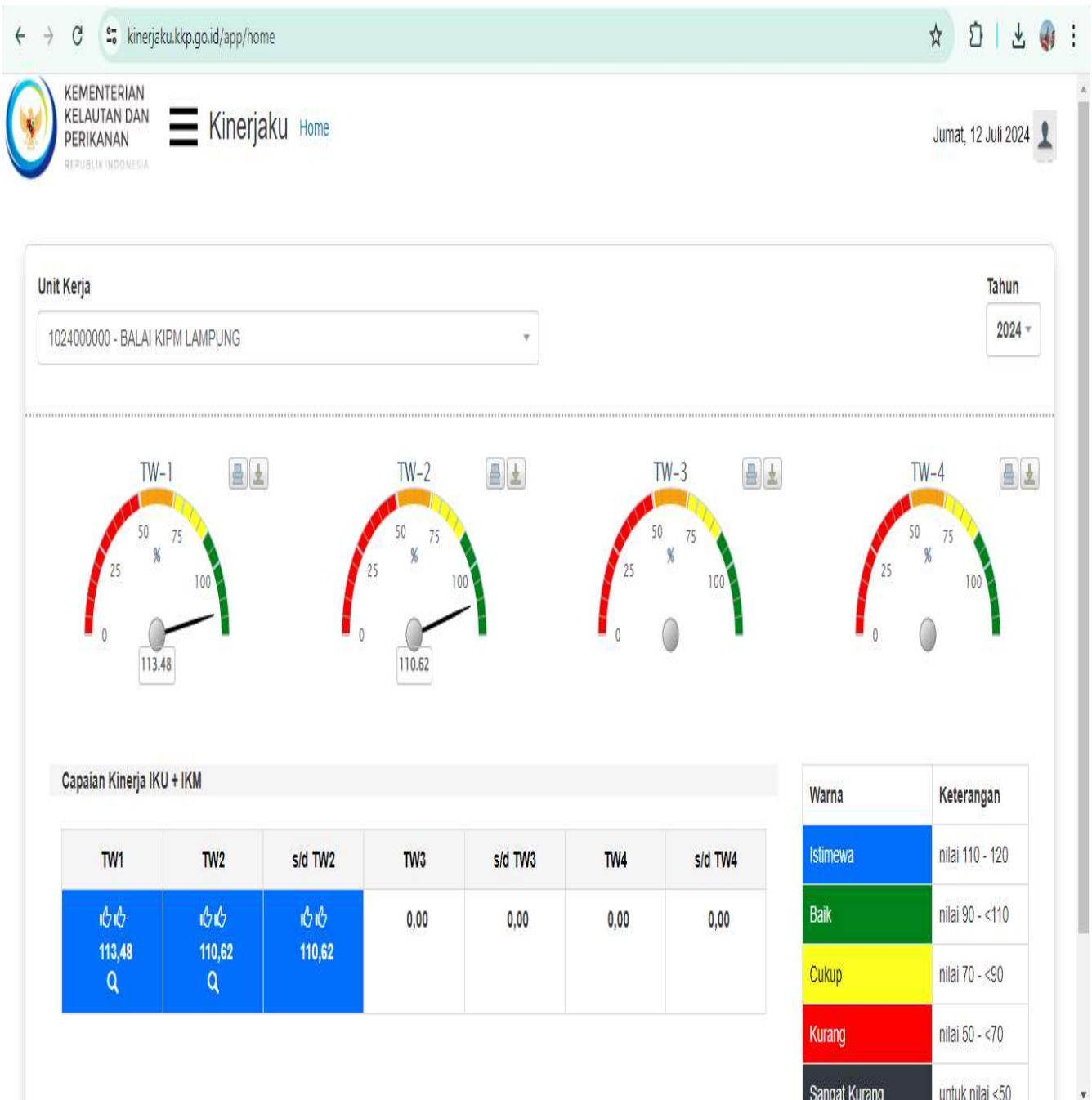
untuk Level 1 (Badan KIPM) terdiri dari capaian kinerja pada 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan dari 18 IKU/IK. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung yang diukur Pertriwulan II pada Tahun 2024 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya tahun 2024. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	%
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>						
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Peranan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	5	10	120
		2	Pengawasan Mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	6	7	117
		3	Monitoring Kesegaran Ikan, residu bahan berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	1	100
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	2	120
		5	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung	21	27	120
		6	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung.	17	18	106
No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target		%
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan Keamanan Hasil Peranan	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	84%	91,42%	109

	Secara Profesional dan Partisipatif	8	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas kompoten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	50	50	100
		9	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	90%	100%	111
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>%</b>	
4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	10	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	81	84,61	105
		12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker lingkup UPT Balai KIPM Lampung.	0	0	0
		13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		14	Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung	80	98	120
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	83	88,54	107
		16	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	40	43,49	109
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0

		18	Tingkat Kepatuhan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
--	--	----	--	---	---	---

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Triwulan II Balai KIPM Lampung Tahun 2024



Gambar 3. 2 Dashboard Capaian Kinerja Triwulan II Balai KIPM Lampung Tahun 2024



Pada gambar diatas, Nilai capaian kinerja IKU mencapai nilai 110,62. Sedangkan capaian kinerja IKU dan IK secara keseluruhan ditunjukkan melalui skor kinerja sebesar 110,62 yang masuk dalam kriteria Istimewa (Biru).

Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/ IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 18 (Delapan Belas) IKU yang diukur pada Triwulan II Tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja (IK) yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing SS dan IKU/IK dapat disampaikan sebagaimana berikut.

*Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif.*

**IK 1**

**Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Lingkup Balai KIPM Lampung**

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan

prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Indikator Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dibandingkan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif												
IK 1	Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Lingkup Balai KIPM Lampung	9	0	5	6	17	7	10	120	59	10	100

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Triwulan II IK 1 pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan TW II tahun 2024 masih di 120%.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2024 dapat dinyatakan sebesar 120%. Balai KIPM Lampung Menargetkan 7 unit yang dapat sertifikat CPIB dengan realisasi 10 Unit Yaitu Gatot Eko Handoyo.PT Sahabat Bahari Internusa (Fresh Cephalopod). PT Sahabat Bahari Internusa (Fresh Shrimp). PT. Sahabat Bahari Internusa (Frozen Cephalopod). PT. Sahabat Bahari Internusa (frozen Shrimp). PT. Sahabt Bahari Internusa (Frozen Demersal Fish). PT.Sahabat Bahari Internusa ( Frozen Pelagic Fish).PT. Sahabat Bahari Internusa (Frozen Shellfish). PT. Sahabat Bahari Internusa (Frozen Sea Snail). Mazkaz Crab. Sehingga capaiannya Triwulan II Tahun 2024 masih 59 % dari capaian Tahun 2023.

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup Balai KIPM Lampung merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP);
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus;
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
  - Pengujian kesegaran ikan (*organoleptik*);
  - Pengujian mikrobiologi (*Total Plate Count, E. colli, Salmonella*, dan parameter lain apabila dibutuhkan);

Indikator Persentase Jumlah monitoring hasil perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif												
IK 2	Pengawasan Mutu hasil Perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	2	7	6	6	6	7	117	100	6	100

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi IK 2 pada TW II Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 masih 100%.

Pencapaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2024 dapat dinyatakan sebesar 100%. Balai

KIPM Lampung Menargetkan 6 Lokasi terdiri dari :

1. Kota Bandar Lampung (Psr Modern Chandra,Psr Modern Galael,Psr Tradisional Panjang, Psr Tradisional Way Halim,TPI/PPI Lempasing,Psr Tradisional Sukarame)
2. Kota Metro (Psr Tradisional Metro,Psr Modern Chandra Metro)
3. Kab. Lampung Selatan (Psr Tradisional Natar,Psr Modern Chandra Natar ,TPI/PPI Rangai,Psr Tradisional Kalianda,TPI/PPI Kalianda)
4. Kab. Tanggamus (TPI/PPI Kota Agung, Psr Tradisional Gisting)
5. Kab.Lampung Timur (Psr Tradisional Way Jepara,TPI/PPI Labuhan Maringgai, TPI/PPI Kuala Penet)
6. Kab.Pringsewu (Psr Tradisional Pringsewu,Psr Modern Chandra Pringsewu)

Sehingga capaiannya Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian Tahun 2023

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat konsumen global, tuntutan konsumen terhadap ketersediaan bahan pangan termasuk produk hasil perikanan yang bermutu dan memenuhi jaminan keamanan pangan (Quality Assurance) semakin meningkat. Kondisi tersebut berdampak kepada negara maju yang cenderung memperketat persyaratan dan ketentuan impor terutama yang berkaitan dengan persyaratan mutu produk hasil perikanan. Permasalahan yang menjadi sorotan terhadap hasil perikanan Indonesia adalah mutu kesegaran ikan yang ada di pelabuhan perikanan/pendaratan ikan dan suplier sangat rendah dan ditangani dengan sistem rantai dingin yang kurang maksimal serta adanya kandungan residu kimia dan bahan berbahaya sehingga ada penolakan hasil perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor, sementara untuk di pasar domestik, masyarakat juga belum memperhatikan akan pentingnya mutu ikan. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.3

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan/turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif											
IK 3	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu bahan berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	-	-	1	1	1	100	100	1	100

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi IK 3 pada TW II Tahun 2024

Pencapaian indikator ini pada tahun 2024 dapat dinyatakan sebesar 100%. Balai KIPM Lampung Menargetkan 1 Lokasi di Perairan Lampung sekitar Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Sehingga capaiannya Triwulan II Tahun 2024 100% sama dengan Tahun 2023.

Sistem *traceability* merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem *traceability* ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri.

Pengembangan produk perikanan berbasis system ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara :

- a. Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam dan luarnegeri;
- b. Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c. Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan;
- d. Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu

terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan system ketertelusuran hasil perikanan.

Target serta Realisasinya Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif												
IK 4 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung	4	1	4	5	8	1	2	120	25	5	100	

Tabel 3.6 Target dan Realisas IK 4 pada TW II Tahun 2024



HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Data perbandingan antara target Tahun 2023 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		Renstra 2020-2024				
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif												
IK 5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung	40	25	40	45	45	21	27	120	29	45	100

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IK 5 pada TW II Tahun 2024

Indikator Sertifikat penerapan system jaminan mutu (sertifikat HACCP) di unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Triwulan I Tahun 2024 di indikator ditargetkan 21 Sertifikat dan teralisasi 27 Serifikat. Sehingga capaiannya 120%. tetapi capaian tersebut masih 60% dari capaian tahun 2023.

#### **IK 6 UPI yang konsisten Menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung**

Indikator jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Terhadap UPI yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada PERMEN KP Nomor 19/2010. Indikator jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan telah mempunyai nomor registrasi dari otoritas kompeten BKIPM. Indikator Unit Usaha Perikanan

yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP.

Realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 mencapai 18 unit pengolahan ikan (UPI) dari target 17 unit atau sebesar 106% dari Target Tahun 2023. Data perbandingan antara target Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%
SS1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif											
IK 6	UPI yang Konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung										
	-	-	15	15	20	17	18	106	75	15	100

Tabel 3.8 Target dan Realisasi IK 6 pada TW II Tahun 2024

Indikator unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikat CKIB. Indikator ini pada Triwulan I tahun 2024 ditargetkan sebanyak 17 Unit dan telah terealisasi 18 Unit. Capaian Tahun Triwulan II TA 2024 Masih 90% dari capaian Tahun 2023.

**IK 7**

**Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (nilai)**

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (nilai) merupakan indikator utama Balai KIPM Lampung dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Se jauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Balai KIPM Lampung.

Indikator Kinerja		Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%
SS2. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung	-	-	-	84	90.39	84	91,42	109	103	84	100

Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 7 pada TW II Tahun 2024



Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Periode TW II Tahun 2024 Balai KIPM Lampung

Indikator ini Triwulan II tahun 2024 dengan nilai target sebesar 84 dengan teralisasi sebesar 91.42%.

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Penerapan Pelayanan Publik
- Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Balai KIPM Lampung.

**IK 8**

**Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung**

Untuk menghasilkan Komoditi hasil perikanan yang sehat dan bermutu diperlukan bahan baku yang baik. Hal ini dikarenakan konsumen semakin sadar perlunya komodi perikanan yang baik, sehat dan aman dikonsumsi. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka nelayan dan pengusaha ikan di tuntut untuk menghasilkan produk yang aman bagi manusia. Dan tidak dibenarkan untuk melalulintaskan ikan dengan kualitas yang jelek karena selain ikan akan merusak citra Negara dan sekaligus akan menjadi hambatan untuk masa mendatang. Untuk mengendalikan pruduk tersebut dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel secara berkala. (official control). Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 8 pada TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%
SS2. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif											
IK 8 Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	-	-	85	80	50	50	100	38	85	100

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator ini target Triwulan II tahun 2024 dengan nilai sebesar 50 dan teralisasi sebesar 50. Capaian Tahun Triwulan II TA 2024 Masih 63% dari capaian Tahun 2023.

**IK 9**

Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)

Untuk menghasilkan Kualitas pelayanan yang baik diperlukan sinergitas berbagai pihak yang terkait. Begitu juga layanan Balai KIPM Lampung dalam memeberikan layanan kepada stake holder diperlukan sinergitas berbagai pihak yang terkait baik di bandara ataupun di pelabuhan laut. Terutama kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak Balai KIPM. Pihak Pelaku usaha hendaknya memahami semua regulasi yang diberlakukan untuk lalulintas produk perikanan. Agar tidak ada mis antara petugas di lapangan dengan pihak stake holder.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS2. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 9	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi /peraturan (%)	-	-	-	90	98	90	100	111	100	90	100

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi IK 9 pada TW II Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka nelayan dan pengusaha ikan di tuntut untuk memahami prosedur dan aturan yang berlaku sebelum melakukan permohonan, agar nanti dalam proses selanjutnya berjalan lancar. Untuk mengendalikan maksud dilakukan survey pengambilan sampel pengajuan secara berkala. Keberhasilan capaian sasaran kegiatan terselenggaranya

pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Pada IKU ini kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi peraturan dengan target 90% pada Triwulan II tahun 2024 dan Terealisasi 100%.Kegiatan pendukung dalam mencapai target indicator diantaranya :

- Melakukan kegiatan kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan
- Melakukan Sosialisasi Standar Regulasi Pemasuan dan Pengeluaran dalam Ranga Peningatan Kepatuhan.

### *Sasaran Strategi 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Pencapaian SS-3 digambarkan dengan 9 (Sembilan) IKU/IK yaitu

1. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Lampung.
2. Indeks profesionalitas ASN,Lingkup Balai KIPM Lampung
3. Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Lampung
4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK atas LK lingkup Balai KIPM Lampung
5. Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Kinerja Balai KIPM Lampung
6. Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Lampung
7. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Lampung
8. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja; Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan dari penganangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima yang berintegritas, transparan dan akuntabel dan memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mendukung program pemerintah membangun suatu pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Data perbandingan antara target Tahun 2024 dan Realisasinya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.12

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	75	0	-	-	80.13	0	0	0	0	75	100

Tabel 3. 12 Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II Tahun 2024

IK 11

### Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Data perbandingan antara target Tahun 2024 dan Realisasinya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.13

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	-	72	73	83	85,63	81	84,61	105	0	86	100

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 11 pada TW II Tahun 2024

Untuk Membangun pegawai bersih dan Profesional dengan menegakan integritas.Pada Tahun 2024 Balai KIPM Lampung mempunyai target 84 pada Triwulan II tahun 2024 dengan realisasi 84,61. dan data dapat diambil dari aplikasi Ropeg.KKP.go.id di Eselon I BPPMHKP.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Lampung adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia. Guna terwujudnya IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Lampung, maka Tim Pembahas/Penilai dari Biro Perencanaan – KKP ditugaskan untuk melakukan kegiatan mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia.

Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan. Penilaian Mandiri SAKIP Internal Lingkup BPPMHKP Tahun 2024 diselenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP. Penilaian rekonsiliasi kinerja mengacu pada Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Internal BPPMHKP dimana aspek penilaian meliputi 4 (empat) unsur/aspek, antara lain :

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Kesesuaian
3. Aspek Ketercapaian
4. Aspek Ketepatan

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 12	Penilaian Mandiri SAKIP satker Balai KIPM Lampung	-	-	85	85	85	0	0	0	0	82	100

Tabel 3. 14 Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2024

Tahun 2024 di IKU Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Lampung indikator ini ditargetkan 82% dan belum ada realisasinya.

**IK 13** **Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelesaian nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah batas tertinggi Temuan Keuangan Hasil LHP BPK, yang dibuktikan dengan Berita Acara LHP Tim Pembahas/Penilai dari BPK. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Lampung adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LK Balai KIPM Lampung Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2023. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU/IK ini dilakukan secara tahunan, pada Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		Renstra 2020-2024				
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	-	-	100	100	0	0	0	0	100	100

Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan tata kelola Pemerintahan yang baik mempunyai IKU penyelesaian temuan BPK memiliki angka target pada tahun 2024 adalah 100 dan belum ada realisasi.

**IK 14**

**Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung(%)**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Lampung yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 80% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2024. Target pengukuran IKU ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Lampung telah ditindaklanjuti sangat baik oleh mitra eselon I. Data perbandingan antara target Tahun 2024 serta Realisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 14	Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	-	82	65	70	98	80	98	120	100	80	100

Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 23 pada Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan Capaian Sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU rekomendasi hasil pengawasan yang di dan sudah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki angka target pada tahun 2024 adalah 80% dan teralisasi 98%

**IK15** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Return SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Lampung pada Tahun 2024 ditargetkan berkategori “Baik” dengan nilai sebesar 93,76

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2019	2020	2021	2022	2023	Target (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	-	93,5	93	89	93,64	83	88,54	107	0	93,64	100

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan II Tahun 2023

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM Lampung didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Dihitung saat semesteran dan akhir tahun.

#### IK 16

#### Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindaklanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. NKA merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Nilai diperoleh berdasarkan data input dan output yang dimasukkan oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu. Data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran Balai KIPM Lampung yang akan diukur pada Tahun 2024 dengan target 82



Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 16	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	-	-	86	81	85,63	40	43,49	109	0	85	100

Tabel 3. 18 Target dan Realisasi IK 16 pada Triwulan II Tahun 2024

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu Kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas, IKU Nilai Kinerja Anggaran memiliki angka target Triwulan II tahun 2024 adalah 40% dan dengan realisasi 43,49% dari Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.8.031.999.000.

#### IK 17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengadaan Barang dan jasa selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIRUP . Persentase tingkat kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah persentase kesesuaian pelaksanaan Pengadaan dengan aturan yang ditetapkan, pengukuran dengan target 80%.

IKU/IK ini diukur secara Tahunan sehingga pada Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan evaluasi pelaksanaan PKPT.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		Renstra 2020-2024				
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	-	-	-	75	75	0	0	0	0	80	100

Tabel 3. 19 Target dan Realisasi IK 17 pada TW II Tahun 2024

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan IKU tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa memiliki angka target pada Tahun 2024 adalah 80% dan Belum ada realisasi.

**IK 18** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengelolaan BMN selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIMAK BMN. Data perbandingan antara target Tahun 2024 dan Target serta Realisasinya Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		Renstra 2020-2024				
	2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	-	-	-	75	98,56	0	0	0	0	80	100

Tabel 3. 20 Target dan Realisasi IK 26 pada Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN memiliki angka target pada tahun 2023 adalah 80 % dan belum ada realisasinya.

### 3.1. Realisasi Anggaran

#### Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARA(Rp)
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
1.	Pengendalian Mutu	409.450.000
2.	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	1.516.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	<b>6.106.049.000</b>
<b>Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2024</b>		<b>8.031.999.000</b>

Tabel 3. 27 Data Anggaran

Alokasi anggaran BKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2024 pada DIPA Awal sebesar Rp 11.594.909.000,- dan Mengalami Revisi sampai 5 kali pada triwulan II Tahun 2024

Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 7.621.363.000,- dan PNPB sebesar Rp 410.636.000,- Pada DIPA Triwulan II Tahun 2024 Nilai PNPB dari target awal Rp. Rp 1.100.000,000 menjadi Rp. 724.090.920,- atau telah tercapai 56 %.

URAIAN	ANGGARAN / PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENDAPATAN</b>			
PNBP	1.150.000.000	<b>436.505.000</b>	37.96 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.150.000.000	<b>436.505.000</b>	37.96 %
<b>BELANJA</b>			
Belanja Pegawai	4.186.224.000	2.500.096.393	59.72%
Belanja Barang	3.845.775.000	993.365.288	25.83%
Belanja Modal	0	0	0%
Belanja Bansos	0	0	0%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.031.999.000</b>	3.493.461.681	<b>43.49%</b>

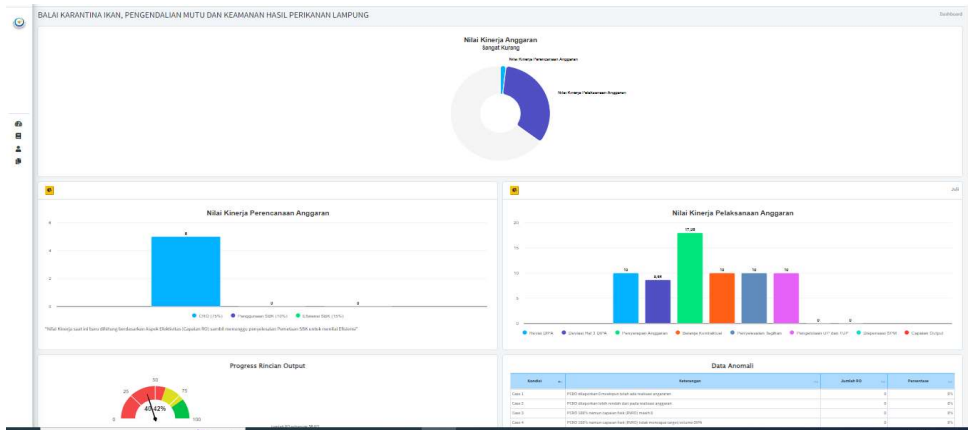
Tabel 3. 31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode Triwulan II TA 2024

### 3.2. Efisiensi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Efisiensi Belanja Bidang Kementerian / Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 seluruh lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran.

Hal ini dilakukan untuk peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan anggaran pembangunan. Untuk itu BKIPM Lampung juga melaksanakan instruksi tersebut dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin. Sumber penghematan bersumber dari penggunaan anggaran belanja non operasional,

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Disamping itu telah melakukan langkah-langkah streaming pertemuan atau sidang, dengan melakukan video conprence agar bisa melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas.



### C. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

PAGU anggaran Balai KIPM Lampung TA 2024 sebesar 8.031.999.000 Capaian realisasi Triwulan II anggaran Balai KIPM Lampung TA 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp. 1.852.218.237,- atau 23.06% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.6.179.780.763 atau 76.94%. Secara lebih rinci, kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data OM SPAN disajikan pada Lampiran

OM-SPAN

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. JUNI

NO	KODE   NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	649615   BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	PAGU	4,186,224,000	3,845,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,031,999,000
		REALISASI	2,500,096,393 (59.72%)	993,365,288 (25.83%)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,461,681 (43.49%)
		SISA	1,686,127,607	2,852,409,712	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,537,319
GRAND TOTAL		PAGU	4,186,224,000	3,845,775,000	0	0	0	0	0	0	0	8,031,999,000	
		REALISASI	2,500,096,393 (59.72%)	993,365,288 (25.83%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,493,461,681 (43.49%)	
		SISA	1,686,127,607	2,852,409,712	0	0	0	0	0	0	0	4,538,537,319	

Download video from this page

1-2 DARI 2 REFRESH

**D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TA 2024 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Balai KIPM Lampung telah melakukan perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 terhadap target kinerja Triwulan II tahun 2024.

Berdasarkan data capaian kinerja dari 18 IKU/IKS yang ada, sebanyak 18(Delapan Belas) IKU/IK telah dilakukan pengukurannya. Secara umum, dari 18 IKU yang dilakukan pengukuran telah mencapai target yang ditetapkan, hasil analisis terbatas terhadap IKU/IK yang telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2024 serta dibandingkan terhadap target pada TA 2024.

**E. ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA	
			REVISI	Rp	%Rp		%
1	Dukungan Manajemen	9.034.102.000,-	6.106.049.000,-	3.370.416.331	55.20%	2.735.632.669	44.80%
2	Pengendalian Mutu	409.450.000,-	409.450.000,-	123.045.350.	30.05%	285.404.650	69.95%
3	Standardisasi dan Kepatuhan	1.516.500.000,-	1.516.500.000	0	0%	1.516.500.000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>11.594.909.000</b>	<b>8.031.999.000</b>	<b>3.493.461.681</b>	<b>43.49%</b>	<b>4.538.537.319</b>	<b>56.51%</b>

Tabel 3.33 Perkembangan Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per 30 Juni 2024

Balai KIPM Lampung TA 2023 melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu 1. (3987) Dukungan Manajemen Internal lingkup Badan Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.6.106.049.000,- 2.(3989) Pengendalian Mutu Rp. 409.450.000,- dan 3, (3990) Standarisasi Sistem dan Kepatuhan Rp. 1.516.500.000,- Sebagian besar kegiatan operasional Balai KIPM Lampung ditampung dalam 3 kegiatan sedangkan untuk Gaji dan keperluan Kantor di Tampung dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup Balai KIPM Lampung

Berikut ini disampaikan Data Perkebang Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per Bulan 2024.

Data realisasi yang tertera di atas sebesar 3.493.461.681,- (Pagu) adalah data yang telah di SPJ-kan ke KPPN dan telah terbit SP2D, sehingga ada Sisa Rp. 4.538.537.319,-. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Balai KIPM Lampung telah mencapai 43.49%.. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian kinerja anggaran maupun kinerja organisasi yang telah ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

## BAB 4 PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2024 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Lampung melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Balai KIPM Lampung Triwulan II Tahun 2024 secara keseluruhan dinilai baik dengan skor kinerja sebesar 110,62.
2. Sebanyak 18 (Delapan Belas ) IKU dan IK yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024 ada yang telah mencapai target bahkan melebihi target dan ada yang dibawah Target yang ditetapkan.
3. Capaian realisasi anggaran Balai KIPM Lampung TW II TA 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp. 3.493.461.681,- atau 43.49% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 4.538.537.319,- atau 56,51%.

### B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan atau kondisi yang belum sesuai harapan pada pencapaian kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai KIPM Lampung:



## **B. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)**

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Balai KIPM Lampung akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan dengan seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyesuaikan agenda untuk penyelesaian target Realisasi IKU yang Sudah tercapai, serta meningkatkan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan penanggungjawab kegiatan secara melekat

